

PROFIL STATISTIK PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DI SEKOLAH INKLUSIF

Nadia Afsari¹, Maulidiah², Iki Yusran³

^{1,2,3}STKIP Andi Matappa

[1nadiaafsari3008@gmail.com](mailto:nadiaafsari3008@gmail.com), [2maulidiahdia246@gmail.com](mailto:maulidiahdia246@gmail.com), [3iki@matappa.ac.id](mailto:iki@matappa.ac.id)

ABSTRACT

This study aims to describe the statistical profile of education for Children with Special Needs (CSN) in inclusive schools in Indonesia. Using a qualitative approach with a literature study method, the research analyzes data related to student distribution, types of special needs, educational levels, services, and the distribution of inclusive schools. The results show that inclusive education has a positive impact on the social, emotional, and academic development of CSN while fostering empathy, tolerance, and inclusiveness among regular students. However, its implementation still faces several challenges, such as a shortage of special education teachers, inadequate facilities, and incomplete curriculum adaptation. Therefore, teacher training in identifying and addressing diverse student needs, strengthening educational policies, and improving infrastructure are essential to achieving high-quality, equitable, and sustainable inclusive education based on educational statistical data.

Keywords: *children with special needs, inclusive schools, education statistics*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil statistik pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah inklusif di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini menganalisis data terkait distribusi siswa, jenis kebutuhan khusus, jenjang pendidikan, layanan, serta sebaran sekolah inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan inklusif memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial, emosional, dan akademik ABK, sekaligus menumbuhkan empati, toleransi, dan sikap inklusif di kalangan siswa reguler. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan guru pendidikan khusus, fasilitas yang belum memadai, serta adaptasi kurikulum yang belum optimal. Oleh karena itu, pelatihan guru dalam mengenali dan menangani kebutuhan siswa, penguatan kebijakan pendidikan, serta peningkatan sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan inklusif yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan berbasis data statistik pendidikan.

Kata Kunci: anak berkebutuhan khusus, sekolah inklusif, statistik pendidikan

A. Pendahuluan

Statistika adalah ilmu yang mempelajari statistik, yaitu ukuran yang diperoleh atau berasal dari sampel. Ini berbeda dengan kata "parameter populasi", yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi. Statistik adalah alat bantu untuk memberikan gambaran sederhana tentang kejadian dalam bentuk angka atau grafik. Sebagai alat bantu, keberhasilan analisis statistik bergantung orang menggunakannya. Sebenarnya, statistik adalah mata pelajaran yang mudah dipelajari dan dipahami jika dipelajari dengan benar, tekun, dan cermat. Bahkan statistik dapat membuat sesuatu yang dianggap rumit menjadi mudah. Angka dalam ilmu statistik adalah simbol atau pernyataan verbal tentang peristiwa atau objek yang ditunjukkan. Karena itu, penggunaannya selalu diposisikan untuk terlihat dalam permainan angka atau kalkulasi numerik. Ada tidak ada alasan untuk menjadi siapapun untuk mengatakan tidak akrab dengan angka-angka (Mundir, 2012). Sedangkan statistika pendidikan adalah ilmu mempelajari cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data pendidikan.

Statistika pendidikan untuk memahami fenomena pendidikan, mengidentifikasi masalah pendidikan, dan mengembangkan solusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Statistika pendidikan adalah statistik dalam pengertian sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang membahas atau mempelajari dan mengembangkan prinsip-prinsip, metode dan prosedur perlu ditempuh, atau dipergunakan dalam rangka pengumpulan, penyusunan, penyajian, analisis bahan keterangan yang berwujud angka mengenai hal yang berkaitan dengan pendidikan (khususnya dalam proses belajar mengajar), dan penarikan kesimpulan, pembuatan perkiraan serta ramalan secara ilmiah atas dasar kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka (Malik & Chusni, 2018).

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 17,96 juta jiwa. Angka ini diperoleh dari prevalensi disabilitas sebesar 6,90% dari total populasi Indonesia. Dalam publikasinya, BPS menggunakan klasifikasi yang mengacu pada

Washington Group on Disability Statistics. Terdapat dua kategori yang umum ditampilkan, yaitu Disabilitas Tipe 1 dan Disabilitas Tipe 3. Disabilitas Tipe 1 mencakup semua individu yang mengalami salah satu dari delapan jenis kesulitan fungsional, mulai dari tingkat sedikit sulit hingga tidak mampu melakukan sama sekali, dengan prevalensi 6,90% atau sekitar 17,96 juta jiwa. Sementara itu, Disabilitas Tipe 3 menggambarkan kondisi disabilitas parah, yaitu ketika seseorang mengalami kesulitan yang sangat berat atau tidak mampu melakukan aktivitas tertentu sama sekali. Prevalensi untuk kategori ini adalah 1,02% atau sekitar 2,65 juta jiwa. Seluruh data bersumber dari publikasi BPS berjudul "Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020."

Anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan individu yang dalam proses tumbuh kembangnya menunjukkan perbedaan atau hambatan dalam aspek tertentu seperti emosi, perilaku, intelektual, sosial, maupun fisik dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya, sehingga memerlukan layanan dan pendekatan pendidikan yang bersifat

husus (Setiawan, 2020). Keberadaan anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah tidak seharusnya diabaikan oleh pendidik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada Pasal 5 Ayat 2, yang menegaskan bahwa setiap warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, maupun sosial berhak memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Regulasi ini menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Untuk memenuhi hak pendidikan, anak berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang setara dengan anak pada umumnya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 31 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Bab IV Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk bagi mereka yang memiliki kebutuhan

husus (Pratiwi, J. C, 2016). Dalam hal ini, Penyelenggaraan sekolah inklusif di Indonesia didasari oleh pengakuan terhadap hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan. Setiap individu memiliki beragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Sebagai makhluk Tuhan dengan derajat tertinggi di antara makhluk hidup lainnya, manusia memiliki kebutuhan yang lebih beragam dan kompleks. Secara umum, kebutuhan manusia mencakup aspek fisik atau kesehatan, sosial emosional, serta pendidikan. Wardani (Pratiwi. J. C, 2016). Dalam konteks ini, anak berkebutuhan khusus pun memiliki hak dan kebutuhan yang sama seperti anak pada umumnya, termasuk dalam hal memperoleh layanan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kemampuannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan profil statistik pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif Indonesia, dengan fokus pada distribusi peserta didik berdasarkan jenis kebutuhan, tingkat pendidikan, jenis layanan, dan sebaran sekolah. Melalui analisis statistik, diharapkan memberikan gambaran faktual tentang kondisi pendidikan inklusif di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka atau *literature review*. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji profil statistik pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Kajian literatur memungkinkan peneliti menyusun gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan teori, hasil penelitian, dan praktik terbaik yang telah diterapkan dalam bidang tersebut. Pendekatan deskriptif analitis untuk mengelaborasi hasil studi literatur dengan cara yang sistematis dan kritis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai referensi seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks pendidikan, artikel prosiding konferensi, serta laporan penelitian membahas topik statistik pendidikan, anak berkebutuhan khusus, dan sekolah inklusif. Pemilihan literatur dilakukan secara cermat untuk menjamin kualitas serta kesesuaian informasi dengan fokus penelitian. Proses penelusuran literatur dilakukan melalui sejumlah basis data akademik, termasuk Google Scholar, portal jurnal institusi, dan

perpustakaan digital universitas yang menyediakan akses terhadap publikasi ilmiah terbaru. Adapun kriteria inklusi mencakup sumber yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, membahas statistik pendidikan serta sekolah inklusif bagi anak berkebutuhan khusus, dan menggunakan metode penelitian yang valid. Sementara itu, kriteria eksklusi diterapkan terhadap sumber yang dianggap tidak relevan dengan topik penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Anak berkebutuhan khusus merupakan istilah lain untuk mengartikan Anak Luar Biasa (ALB) yaitu anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, perbedaan tersebut terletak pada fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berkebutuhan khusus memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lain menurut Mulyono & Delfi (Pratiwi, J. C, 2016).

Anak berkebutuhan khusus adalah adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak

mampuan mental, emosi dan fisik. Yang termasuk anak berkebutuhan khusus antara lain: tunanetra, tunarungu, tunagrhitia, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan prilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan. Istilah lain bagi anak berkebutuhan khusus adalah anak luar biasa, anak cacat dan juga anak cerdas istimewa dan akat istimewa. Anak berkebutuhan khusus biasanya bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sesuai dengan kekhususannya masing-masing Damayanti (Fauzan,dkk., 2021).

Pengertian anak berkebutuhan khusus memiliki arti yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian anak luar biasa. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikannya memerlukan pelayanan yang spesifik dan berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus ini mengalami hambatan dalam belajar dan perkembangan, baik itu disebabkan karena kurang atau terlalu berlebihnya potensi yang dimiliki sang anak. Oleh sebab itu mereka memerlukan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan belajar masing-masing anak. Anak berkebutuhan khusus

(ABK) adalah anak secara signifikan mengetahui keluhan/ penyimpangan (fisik, mental, intelektual social dan emisional), dalam proses tumbuh kembang dibandingkan dengan anak-anak lain yang sesuai sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Saputra (Fauzan,dkk., 2021).

Secara umum, sebagian besar hak ABK telah terpenuhi, terutama dalam aspek layanan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, kemampuan, dan jenis disabilitas mereka. Guru menunjukkan upaya konsisten dalam memberikan perlakuan adaptif serta pemahaman terhadap ritme belajar siswa. Pemenuhan hak atas pendidikan agama juga berlangsung optimal melalui kegiatan keagamaan rutin yang mendukung perkembangan spiritual siswa. Selain itu, penyediaan fasilitas pembelajaran, beasiswa, dan bantuan lain menunjukkan komitmen sekolah dalam mendukung proses belajar ABK, termasuk penggunaan media dan aktivitas kreatif untuk mengembangkan keterampilan motorik. Penilaian hasil belajar melalui observasi terstruktur, komunikasi intensif dengan orang tua, dan pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD), sementara layanan khusus

diberikan melalui pendampingan guru inklusi dan program belajar tambahan setelah sekolah. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa aspek yang belum terpenuhi secara optimal, seperti keterlibatan penuh ABK dalam seluruh program pendidikan dan ketiadaan kebijakan penyelesaian studi lebih awal bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun implementasi pendidikan inklusif telah berjalan baik, upaya penguatan dan perbaikan masih diperlukan agar seluruh hak ABK dapat terpenuhi secara komprehensif dalam lingkungan sekolah inklusif. Permatasari, D. R. (2016).

Berdasarkan penelitian tentang efektivitas pelatihan identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bagi guru sekolah inklusi menunjukkan bahwa pelatihan ini terbukti signifikan dalam meningkatkan kemampuan guru. Hasil analisis menunjukkan rata-rata nilai pre-test sebesar 8,54 meningkat menjadi 11,5 pada post-test, dengan peningkatan 2,97 poin dan nilai signifikansi $p = 0,000 (< 0,05)$, serta 80% peserta mengalami peningkatan kemampuan. Temuan ini menegaskan pentingnya pelatihan

bagi guru, terutama yang tidak memiliki latar belakang pendidikan luar biasa atau psikologi, agar mampu mengenali jenis dan karakteristik ABK memberikan layanan pendidikan yang tepat dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Pelatihan yang melibatkan presentasi materi, diskusi interaktif, tanya jawab, dan simulasi praktik terbukti efektif dalam memperkuat pemahaman dan keterampilan guru dalam mengidentifikasi ABK (Satwika, dkk., 2018).

Hasil survei terhadap 51 guru TK di DKI Jakarta menunjukkan bahwa kesadaran guru mengenai deteksi dini anak berkebutuhan khusus (ABK) sangat tinggi, dengan 98% guru mengetahui metode deteksi dini dan seluruh responden (100%) menganggapnya sangat penting, meskipun hanya 52,9% yang pernah mengikuti pelatihan terkait. Mayoritas guru telah memiliki pengetahuan praktis mengenai perilaku ABK, di mana 92,2% menyatakan familiar dan 86,3% pernah mengamati perilaku tersebut, serta 74,5% telah mengidentifikasi ABK di kelas mereka. Selain itu, 72,5% guru memahami diferensiasi kegiatan pembelajaran dan 76,5% telah menerapkannya,

sementara 94,1% meyakini bahwa diferensiasi dapat mengoptimalkan proses belajar; seluruh guru juga sepakat perlunya pedoman deteksi dini yang sederhana dan mudah dipahami. Panduan identifikasi yang dikembangkan kemudian divalidasi melalui evaluasi pakar dan uji coba lapangan, dengan hasil evaluasi pakar media berada pada kategori “baik” (60,41%), evaluasi ahli materi meningkat dari 78,33% menjadi 86,25% (kategori “sangat baik”), dan evaluasi pakar instrumen meningkat dari 74,99% menjadi 82,63% (kategori “sangat baik”). Uji coba guru juga menunjukkan kelayakan yang tinggi, ditunjukkan melalui skor 73,80% pada uji satu-ke-satu, 76,42% pada uji kelompok kecil, dan 82,38% pada uji lapangan utama. Secara keseluruhan, panduan identifikasi berbasis model ADDIE dan Rowntree ini dinilai layak, efektif, dan praktis untuk digunakan dalam mendukung proses identifikasi ABK di sekolah inklusif, dengan draf akhir disempurnakan berdasarkan seluruh tahapan validasi dan uji coba. Ashari, D. A. (2021).

Berdasarkan analisis dokumen penelitian yang dilakukan oleh (Irmawati, dkk., 2024) tentang implementasi kebijakan pendidikan

inklusif di Sekolah Dasar Kota Bogor, ditemukan bahwa pada tahun pelajaran 2022/2023, sebanyak 67 dari 208 sekolah dasar negeri (32%) telah menerapkan pendidikan inklusif yang melayani 488 anak Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK), dengan dampak positif berupa peningkatan rasa inklusi, kompetensi, dan kepercayaan diri PDBK, serta tumbuhnya nilai empati dan toleransi di kalangan siswa reguler. Namun, implementasi program ini masih menghadapi tantangan signifikan, yaitu kekurangan guru pendamping khusus yang berpengalaman, keterbatasan pengetahuan guru kelas dalam penanganan PDBK, pelatihan yang tidak memadai, fasilitas prasarana pendukung yang belum optimal (seperti alat bantu penglihatan, pendengaran, buku Braille, dan kursi roda), ruang kelas yang sempit dengan kondisi bangunan tidak aksesibel, modifikasi kurikulum yang hanya terbatas pada bentuk evaluasi tanpa adaptasi komprehensif pada materi dan proses pembelajaran, serta sosialisasi kebijakan Perwali Kota Bogor Nomor 70 Tahun 2017 yang belum berkelanjutan dan distribusi PDBK yang tidak merata di sekolah-sekolah

inklusif. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) yang melibatkan semua pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan koordinasi antar instansi pemerintah daerah, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang lebih sistematis untuk mencapai implementasi pendidikan inklusif yang lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur dan analisis terhadap berbagai sumber, dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus (ABK) merupakan wujud nyata dari pelaksanaan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Statistik pendidikan menunjukkan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih cukup besar, sehingga menuntut adanya kebijakan dan strategi pendidikan yang komprehensif, adaptif, serta berkelanjutan. Penerapan pendidikan inklusif telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan sosial, emosional, dan akademik peserta didik berkebutuhan khusus, sekaligus menumbuhkan sikap empati dan

toleransi di kalangan siswa reguler. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan guru pendamping khusus, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta adaptasi kurikulum dan kebijakan yang belum optimal. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelatihan identifikasi ABK bagi guru memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemampuan mengenali karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi aspek kunci keberhasilan implementasi pendidikan inklusif.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penggunaan pendekatan statistika pendidikan penting dalam menggambarkan kondisi nyata penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Analisis data yang sistematis dan akurat dapat menjadi dasar ilmiah bagi pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna mewujudkan pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan bagi seluruh anak, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, disarankan agar pemerintah dan pemangku kebijakan memperkuat regulasi dan kebijakan pendidikan inklusif disertai dengan pengawasan, evaluasi, serta pendanaan yang berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memperluas pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di setiap daerah untuk mendukung kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Sekolah dan pendidik diharapkan dapat menyediakan fasilitas pembelajaran yang ramah disabilitas serta melaksanakan program pelatihan dan pendampingan bagi guru secara berkala agar mampu mengembangkan metode pembelajaran yang adaptif dan berbasis kebutuhan individual siswa. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan perlu memperkuat kurikulum pendidikan guru agar mencakup kompetensi dalam menangani anak berkebutuhan khusus, baik melalui mata kuliah khusus maupun praktik lapangan di sekolah inklusif. Selain itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis data statistik terkini guna memperkaya pemahaman tentang

distribusi, perkembangan, dan efektivitas pendidikan inklusif di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat dapat menumbuhkan kesadaran dan sikap inklusif dalam kehidupan sosial sehari-hari, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat diterima, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal di lingkungan sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, D. A. (2021). Panduan mengidentifikasi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2), 1095-1110
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (20 Desember 2024). Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020. Diakses pada 2 Desember 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/20/43880dc0f8be5ab92199f8b9/potret-penyandang-disabilitas-di-indonesia--hasil-long-form-sp2020.html>
- Fariq, A. (2011). Perkembangan dunia konseling memasuki era globalisasi. *Pedagogi*, 11 Nov 2011(Universitas Negeri Padang), 255-262.
- Fauzan, H. N., Francisca, L., Asrini, V. I., Fitria, I., & Firdaus, A. A. (2021). Sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus (abk) menuju inklusi. *Pensa*, 3(3), 496-505.
- Irmawati, I., Rahmawati, R., & Rusliandy, R. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 168-184.
- Malik, A., & Chusni, M. M. (2018). Pengantar statistika pendidikan: Teori dan aplikasi.
- Mundir, M. (2012). Statistik pendidikan; Pengantar analisis data untuk penulisan skripsi dan tesis.
- Permatasari, D. R. (2016). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 25(2), 176-186
- Pratiwi, J. C. (2016). Sekolah inklusi untuk anak berkebutuhan khusus: tanggapan terhadap tantangan kedepannya. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2).
- Satwika, Y. W., Khoirunnisa, R. N., Laksmiwati, H., & Jannah, M. (2018). Efektivitas pelatihan identifikasi anak berkebutuhan khusus pada guru sekolah inklusi. *PSIKOSAINS (Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Psikologi)*, 13(2), 109-121.
- Setiawan, I. (2020). A to Z anak Berkebutuhan Khusus. CV Jejak (Jejak Publisher).